

TRANSKRIP WAWANCARA

Penelitian : Implementasi E-legislasi
 Nama Informan : Rahendro Jati, SH., M.Si.
 Selaku : Kepala Bagian Program Penyusunan Laporan (P2L), Badan Pembinaan Hukum Nasional

No.	Indikator, Pertanyaan	Jawaban Informan
1.	<i>E-rulemaking Framework</i>	
1	Perencanaan kebutuhan ICT termasuk SDM Bagaimana perencanaan kebutuhan ICT termasuk SDM dibuat?	P2L bukan setara Pusdatin. Kami di P2L telah mengajukan perencanaan kebutuhan dukungan ICT termasuk kebutuhan SDM yang belum memadai terkait e-legislasi yang diselenggarakan di BPHN kepada instansi induk, Kemenkumham, namun belum dapat dipenuhi.
2	Jenis partisipasi Apakah sudah tentukan jenis partisipasi yang diharapkan (who, what, when)?	Saat ini kami baru dalam tahap, apapun yang penting semuanya masuk dulu.
3	Strategi diseminasi informasi Bagaimanakah strategi diseminasi informasi publik mengenai e-legislasi saat ini?	Saat ini diseminasi informasi publik belum memiliki strategi tertentu, namun ke depannya kami sedang dalam tahap merencanakan adanya strategi itu.
2.	Komunikasi Bagaimanakah bentuk komunikasi yang BPHN dilakukan dalam pelaksanaan e-legislasi?	Kami di BPHN mba, dalam berkomunikasi menggunakan berbagai saluran, misalkan rapat untuk membahas konsep, rencana, dan pelaksanaan, serta progress partisipasi masyarakat dalam legislasi ini. Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai media komunikasi yang ada sekarang ini. Kami juga berkoordinasi biasanya dalam rapat-rapat rutin dan disertai dengan dokumen pendukung dengan instansi induk di Kemenkumham terutama berkaitan dengan perencanaan dukungan sumber daya seperti server, SDM, anggaran, dan yang kaitannya dengan substansi ke unit-unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No.	Indikator, Pertanyaan	Jawaban Informan
3.	<p>Sumber daya</p> <p>Bagaimanakah kondisi dukungan sumber daya bagi pelaksanaan e-legislasi?</p>	<p>Kondisi saat ini sebagian infrastruktur ICT masih tersebar di BPHN dan di instansi induknya (Pusat Data dan Informasi, Kemenkumham) ke depannya arahnya akan dimigrasikan ke Pusdatin Kemenkumham.</p> <p>Untuk dukungan sumber dana telah ada, namun jumlahnya belum sesuai dengan yang kita butuhkan. Demikian juga mengenai jumlah dan spesifikasi SDM yang diperlukan, sudah kami usulkan ke pusat (Kemenkumham), namun belum terealisasi sesuai dengan kebutuhan, karena terdapat keterbatasan sumber daya dan prioritas dari organisasi.</p> <p>Saat ini dokuemn LKj BPHN tahun 2018 belum dapat disajikan ke masyarakat karena masih di-review oleh Irjen.</p>